

### **BAB III**

#### **PEMBANGUNAN DAERAH PASCA PEMEKARAN DI KABUPATEN**

##### **TASIKMALAYA TAHUN 2011-2015**

Tasikmalaya merupakan sebuah Kabupaten di Jawa Barat yang melakukan pemekaran daerah menjadi Kabupaten dan Kota setelah pemekaran. Sengketa aset daerah yang memerlukan waktu hingga 12 tahun dari Tahun 2001-2013. Perebutan aset ini sangat panjang waktunya daripada daerah-daerah lain di Jawa Barat yang melakukan pemekaran seperti seperti Kota Depok (1999), Kota Cimahi (2001), Kota Bekasi (2001), Kota Banjar (2002), Kabupaten Bandung Barat (2007), Kabupaten Pangandaran (2012), dan Kabupaten Depok (2012) (Warta Bappeda, 2015). Sengketa aset yang diperebutkan oleh Kabupaten/Kota Tasikmalaya dilatarbelakangi dengan banyaknya aset Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang ada di wilayah Pemerintah Kota Tasikmalaya. Pada waktu itu, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menolak menyerahkan 85 asetnya pada Pemerintah Kota Tasikmalaya, hingga Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah Jawa Barat turut menengahi persoalan aset itu sejak tahun 2008 hingga tahun 2013 (Sindonews, 2013).

Undang-Undang Nomor 10/2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya harus menyerahkan seluruh asetnya yang ada di Kota Tasikmalaya. Akan tetapi undang-undang tersebut menjadi pro dan kontra antara Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menolak dikarenakan sebagian aset

yang ada di pemerintah Kabupaten Tasikmalaya masih dibutuhkan untuk menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pada waktu itu pemerintah Kabupaten Tasikmalaya masih membutuhkan pemasukan daerah untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur pemerintahan baru di Singaparna yang merupakan ibu kota baru Kabupaten Tasikmalaya (Sindonews, 2013).

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya masih membutuhkan dana yang cukup besar untuk pembangunan fasilitas pasca perpindahan ibu Kota Kabupaten Tasikmalaya di Singaparna mengingat aset yang dibagikan kepada Kabupaten Tasikmalaya lebih sedikit dari pada Kota Tasikmalaya. Kabupaten Tasikmalaya perlu usaha yang cukup keras untuk membangun daerahnya menjadi Kabupaten yang lebih maju dengan segala aset yang sekarang dimiliki. Sehingga Kabupaten Tasikmalaya dapat mengembangkan daerahnya secara mandiri dan dapat menciptakan pelayanan publik dengan maksimal. Berikut adalah pembahasan terkait dengan pembangunan daerah pasca pemekaran di Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2011-2015:

### **Pembangunan Daerah Pasca Pemekaran di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015**

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Hasil dari pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai wujud peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata (Nurridha, 2014). Pembangunan daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola

kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut (Nurridha, 2014).

Pembangunan Daerah merupakan suatu proses untuk mewujudkan berbagai tujuan yang dikehendaki dan dilaksanakan secara sistematis dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pembinaan/*monitoring* dan evaluasi terhadap pemanfaatan hasil-hasilnya. Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan harapan seluruh *stakeholder* tidak terlepas dari peran seluruh pemangku kepentingan yaitu pemerintah daerah, masyarakat dan swasta. Komitmen bersama serta konsistensi dalam melaksanakan pembangunan merupakan modal utama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan daerah juga merupakan pembangunan yang segala sesuatunya dipersiapkan dan dilaksanakan oleh daerah, mulai dari perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawabannya (Munir, 2002).

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai salah satu SKPD (Satuan Kinerja Perangkat Daerah) Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam urusan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah agar berjalan sepenuhnya mengarah pada pencapaian Visi dan Misi.

Pembentukan wilayah dilandasi oleh hukum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mana dilaksanakannya otonomi daerah. Pemekaran wilayah merupakan wujud dari keinginan masyarakat di suatu

wilayah dalam rangka menumbuhkembangkan daerahnya dari segi ekonomi, politik, sosial, budaya dan keamanan. Pemekaran wilayah merupakan proses pemecahan atau pembagian wilayah, dari sebuah wilayah provinsi, kabupaten, ataupun kota menjadi lebih dari satu wilayah. Pemekaran wilayah dipandang sebagai sebuah solusi untuk mempercepat proses pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan yang lebih baik lagi bagi masyarakat di daerah. Pemekaran wilayah juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan daerah.

Tasikmalaya merupakan sebuah Kota di Jawa Barat yang melakukan pemekaran daerah menjadi Kabupaten. Perebutan aset ini sangat panjang waktunya daripada daerah-daerah lain di Jawa Barat yang melakukan pemekaran seperti Kota Depok (1999), Kota Cimahi (2001), Kota Bekasi (2001), Kota Banjar (2002), Kabupaten Bandung Barat (2007), Kabupaten Pangandaran (2012), dan Kabupaten Depok (2012) (Warta Bappeda, 2015). Sengketa aset yang diperebutkan oleh Kabupaten/Kota Tasikmalaya dilatarbelakangi dengan banyaknya aset Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang ada di wilayah Pemerintah Kota Tasikmalaya yang pada akhirnya dari jumlah keseluruhan mencapai 85 aset tersebut 44 aset dihibahkan kepada Kota Tasikmalaya dan 41 aset yang menjadi milik Kabupaten Tasikmalaya. 85 aset tersebut meliputi:

**Tabel 3.1. Jumlah Aset Keseluruhan di Tasikmalaya Sebelum Pemekaran**

NO	ASET YANG DISENGKETAKAN	PASCA PEMEKARAN	
	TANAH DAN BANGUNAN	KABUPATEN	KOTA
1	DPRD	Terminal Indihiang	DPRD
2	Taman Alun-Alun dan Monumen	Eks terminal bus Cilembang, Kantor KPPSA, Kantor UPTD Dishub Kota, dan Kios	Taman Alun-Alun dan Monumen
3	Galih Pawestri dan TK Pertiwi	Kantor UPTD Balai Latihan Kerja (BLK)	Galih Pawestri dan TK Pertiwi
4	Gedung KORPRI dan Perpustakaan	Ex Gudang Parmasi dan ex Kandepkes	Gedung KORPRI dan Perpustakaan
5	Kantor Kwarcab Pramuka	Ex Pasar dan RPH Indihiang	Kantor Kwarcab Pramuka
6	Gedung Ex Dispenda, Gedung Sekretariat BKPD/BPR, Kantor P2M Dan Ex.PUKotip	Komplek Gedung Negara dan Pendopo	Gedung Ex Dispenda, Gedung Sekretariat BKPD/BPR, Kantor P2M Dan Ex.PUKotip
7	Pasar Pancasila	Bappeda	Pasar Pancasila
8	Ruko/Kios pancasila Timur	Komplek Sekretariat Daerah	Ruko/Kios pancasila Timur
9	Pasar Cikurubuk dan Kantor UPTD Pengelola Pasar	Gedung Satkorlak (Pabrik Es)	Pasar Cikurubuk dan Kantor UPTD Pengelola Pasar
10	Pasar Besi Sumber Makmur	Gedung SPHB/BINMAS	Pasar Besi Sumber Makmur
11	UPTD Pengelola Pasar	MES SKP dan Tanah Kolam	UPTD Pengelola Pasar
12	Pasar Padayungan	MES Sukarendeng	Pasar Padayungan

<b>13</b>	Pos Retribusi	Sawah, Kolam BBI Cibeuti	Pos Retribusi
<b>14</b>	Sub Terminal Cicariang	Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sub Terminal Cicariang
<b>15</b>	Sub Terminal Tamansari	Ex Gedung Kantor	Sub Terminal Tamansari

Aset-aset di Kabupaten Tasikmalaya seharusnya dilimpahkan seluruhnya kepada Kota Tasikmalaya. Hal ini tertulis dalam Undang-undang nomor 10 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya. Akan tetapi, dikarenakan Kabupaten Tasikmalaya memerlukan modal untuk membangun daerahnya maka pada akhirnya 41 aset dihibahkan Kabupaten untuk menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Bagian Program, yaitu:

No	ASET YANG DISENGKETAKAN	PASCA PEMEKARAN	
	TANAH DAN BANGUNAN	KABUPATEN	KOTA
25	Rumah Dinas Tagar Kolong Cieunteung dan Perluasan	Dinas Bina Rumah Kebudayaan	Rumah Sakit Cianjur Sam Basar
26	Mts. Sub Perondong Bencana Alam	Kantor, Gedung dan Bangunan BKKP/DP	Kantor Dinas dan Belianan
27	Sawah, Blok Baiti Gitaniti Kantor PUSKUB	RPH Dinas	Sawah dan SKUDM
28	Komplek Inspektorat	BKKP Dinas Rumah	Komplek
29	Kantor Dinas Kehutanan dan Ex. Disaubun, Rumah Dinas Perkebunan	Kantor BPN / SPBU	Ex. Disaubun,
30	Gedung Kantor Perikanan Dan Eks. Gung Kasato. 35 H. Abbas	SMA Peralatan	Gedung Kantor
31	Sawadayaan	Benteng Gunung	Benteng Dan
32	Kantor UPTD Bina Karya Loka (BKL) Ex. Kantor Pembangunan Dinas Mustopo Sampi Karang Resik	Sawah	Kantor UPTD
33	Kantor Dinas Kesehatan Rumah Dinas	Kantor Dinas Pendidikan	Kantor Dinas
34	Kantor Dinas Kesehatan Rumah Dinas (Gn Koneng)	Kantor Dinas Pendidikan	Kantor Dinas
35	Kantor Dinas Kesehatan Rumah Dinas (Gn Koneng)	Kantor Dinas Pendidikan	Kantor Dinas
36	Kantor Dinas Kesehatan Rumah Dinas (Gn Koneng)	Kantor Dinas Pendidikan	Kantor Dinas
37	Kantor Dinas Kesehatan Rumah Dinas (Gn Koneng)	Kantor Dinas Pendidikan	Kantor Dinas
38	Kantor Dinas Kesehatan Rumah Dinas (Gn Koneng)	Kantor Dinas Pendidikan	Kantor Dinas
39	Kantor Dinas Kesehatan Rumah Dinas (Gn Koneng)	Kantor Dinas Pendidikan	Kantor Dinas
40	Kantor Dinas Kesehatan Rumah Dinas (Gn Koneng)	Kantor Dinas Pendidikan	Kantor Dinas
41	Kantor Dinas Kesehatan Rumah Dinas (Gn Koneng)	Kantor Dinas Pendidikan	Kantor Dinas
42	Kantor Dinas Kesehatan Rumah Dinas (Gn Koneng)	Kantor Dinas Pendidikan	Kantor Dinas
43	Kantor Dinas Kesehatan Rumah Dinas (Gn Koneng)	Kantor Dinas Pendidikan	Kantor Dinas
44	Kantor Dinas Kesehatan Rumah Dinas (Gn Koneng)	Kantor Dinas Pendidikan	Kantor Dinas
45	Kantor Dinas Kesehatan Rumah Dinas (Gn Koneng)	Kantor Dinas Pendidikan	Kantor Dinas
46	Kantor Dinas Kesehatan Rumah Dinas (Gn Koneng)	Kantor Dinas Pendidikan	Kantor Dinas
47	Kantor Dinas Kesehatan Rumah Dinas (Gn Koneng)	Kantor Dinas Pendidikan	Kantor Dinas
48	Kantor Dinas Kesehatan Rumah Dinas (Gn Koneng)	Kantor Dinas Pendidikan	Kantor Dinas
49	Kantor Dinas Kesehatan Rumah Dinas (Gn Koneng)	Kantor Dinas Pendidikan	Kantor Dinas
50	Kantor Dinas Kesehatan Rumah Dinas (Gn Koneng)	Kantor Dinas Pendidikan	Kantor Dinas
51	Kantor Dinas Kesehatan Rumah Dinas (Gn Koneng)	Kantor Dinas Pendidikan	Kantor Dinas
52	Kantor Dinas Kesehatan Rumah Dinas (Gn Koneng)	Kantor Dinas Pendidikan	Kantor Dinas
53	Kantor Dinas Kesehatan Rumah Dinas (Gn Koneng)	Kantor Dinas Pendidikan	Kantor Dinas
54	Kantor Dinas Kesehatan Rumah Dinas (Gn Koneng)	Kantor Dinas Pendidikan	Kantor Dinas

“Iya, kan karena pasca pemekaran itu kan jadinya di Kabupaten harus menyerahkan semua aset kepada Kota, dan Kabupaten

*Pemerintahannya harus pindah, ini kan di Undang-undang bunyinya itu bahwa aset di Kabupaten harus diserahkan ke Kota, seiring berjalannya waktu akhirnya dibagilah aset itu karena Kabupaten juga harus membangun, tahun 2013 akhirnya selesai masalah aset itu yang dimediasi oleh Pemerintah Provinsi”*(Wawancara pada hari Selasa, 10 Januari 2017).

Setelah adanya pemekaran pada tahun 2001, Kabupaten Tasikmalaya mulai membangun daerah meskipun sengketa tentang aset-aset daerah masih berlangsung hingga tahun 2013. Pembangunan pun mulai memperlihatkan hasil pada tahun 2011-2015 yang tertuang dalam isu-isu strategis RPJMD Kabupaten Tasikmalaya diantaranya adalah penanggulangan kemiskinan berbasis perdesaan, pengendalian laju pertumbuhan penduduk, penuntasan wajar Dikdas (pendidikan dasar) 9 Tahun dan rintisan wajar Dikdas 12 tahun, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, pembangunan infrastruktur kawasan pusat pemerintahan, peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah, peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan desa, peningkatan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan, pembangunan infrastruktur pedesaan/perkotaan dan pengembangan saran prasarana permukiman, peningkatan ketersediaan pelayanan prasarana dan sarana untuk mendukung proses produksi pertanian serta mensinergitaskan usaha agribisnis dari Hulu sampai Hilir, penataan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, peningkatan pengelolaan aset daerah, penanggulangan bencana daerah, serta peningkatan kualitas lembaga pendidikan keagamaan dalam kehidupan social dan perekonomian masyarakat (RPJMD Kabupaten Tasikmalaya, 2011-2015).



Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan daerah menurut Bintoro (1988)

adalah :

1. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Faktor Sistem Yang Digunakan
3. Faktor Pengembangan Ilmu dan Teknologi
4. Faktor Pendanaan

Berikut secara rinci pembangunan daerah di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2011-2015 dapat dilihat melalui:

### **1. Sumber Daya Manusia yang Mendukung Pembangunan Daerah**

Kualitas pembangunan daerah yang baik akan lebih mudah diciptakan oleh SDM yang tepat dan berkualitas, kemudian perencanaan daerah yang baik juga lebih mudah untuk diimplementasikan di dalam program-program pembangunan. Oleh karena itu, kualitas perencanaan daerah yang baik sangat tergantung pada kemampuan dan keahlian oleh para perencananya yaitu SDM. SDM dalam perencanaan pembangunan dapat dilihat dua aspek yaitu aspek kuantitas dan kualitas. Kuantitas menyangkut dengan jumlah SDM dalam pembangunan. Kualitas SDM merupakan mutu sumber daya manusia yang menyangkut kemampuan nonfisik (kecerdasan dan mental). Oleh karena itu kepentingan percepatan suatu pembangunan di bidang apapun, maka peningkatan kualitas SDM merupakan persyaratan utama. Kualitas SDM menyangkut

dengan dua aspek, yaitu fisik dan non fisik yang menyangkut kemampuan bekerja, berfikir, dan keterampilan-keterampilan lain (Bintoro, 1988).

Sumber Daya Manusia atau *human resources* mengandung dua pengertian. Pertama, adalah usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal lain SDM mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Pengertian kedua, SDM menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai kegiatan ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau masyarakat (Sumarsono, 2003).

Kualitas pembangunan daerah yang baik akan lebih mudah diciptakan oleh SDM yang tepat dan berkualitas, kemudian perencanaan daerah yang baik juga lebih mudah untuk diimplementasikan di dalam program-program pembangunan. Oleh karena itu, kualitas perencanaan daerah yang baik sangat tergantung pada kemampuan dan keahlian oleh para perencananya yaitu SDM. Di dalam struktur BAPPEDA terdapat beberapa orang pada setiap bagian, yang terdiri dari 1 kepala bagian dan beberapa staff bagian. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Rosi staff bidang program, yaitu”

“Sumber Daya Manusia (SDM) sudah mencukupi kebetulan kita di Kasubag program itu ada macem-macam orang yang terdiri dari satu Kasubag dan beberapa orang staff. Masing-masing itu punya fungsi yang sudah dibagi, ada yang memegang khusus RKPD, masing-masing punya kerjaan sendiri”. (Wawancara pada hari jum’at, tanggal 3 Maret 2017)

Ketersediaan sumber daya manusia yang kuantitasnya memadai secara tidak langsung mempengaruhi proses berhasilnya pelaksanaan pembangunan daerah. Kabupaten Tasikmalaya dilihat dari kuantitas SDM sudah cukup baik karena pada dasarnya pekerjaan di bagian program khususnya sudah dibagi sesuai fungsinya masing-masing. Misalnya, ada yang mengatur tentang perencanaan pembangunan, pengawasan atau monitoring hingga evaluasi pembanguna daerah. Berdasarkan jenis kelamin, pegawai didominasi oleh Laki-laki sebanyak 45 orang atau 77,58 % sedangkan Perempuan sebanyak 13 orang atau 22,42%.

**Tabel 3.2. Rekapitulasi Pegawai BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya  
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2015**

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Kepala Dinas	1	-	1
2	Sekretariat	10	8	18
3	Bidang Fisik	8	1	9
4	Bidang Ekonomi	9	1	10
5	Bidang Sosial dan Pemerintahan	8	2	10
6	Bidang Statistik dan Pelaporan	9	1	10
<b>Jumlah Total</b>		<b>45</b>	<b>13</b>	<b>58</b>

*Sumber : Data Kepegawaian BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015 termasuk dengan tenaga kerja kontrak.*

Selain hal tersebut, SDM di Kabupaten Tasikmalaya dirasa sudah cukup untuk menjalankan pembangunan daerah didukung dengan adanya LAKIP (Laporan Akhir Kinerja Pemerintah) mulai tahun 2011-2015 yang menyatakan bahwa kekuatan BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya ada pada Komitmen pimpinan menuju Manajemen Perencanaan yang tangguh dan juga SDM yang cukup (Lakip Kabupaten Tasikmalaya, 2015). Akan tetapi, disamping hal tersebut ada beberapa kelemahan SDM BAPPEDA yang tentu dapat menghambat jika tidak diperbaiki yaitu diantaranya adalah kurangnya minat SDM untuk memperoleh sertifikasi perencana (Jabatan Fungsional Perencana) sehingga kemampuan SDM dalam perencanaan pembangunan hingga evaluasi tidak memiliki peningkatan atau dapat dikatakan *stagnan*, kemudian kurang mampunya SDM mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam bidang perencanaan hal inilah yang membuat perencanaan disuatu daerah yaitu Kabupaten Tasikmalaya kurang mampu berjalan dengan baik, selanjutnya SDM terlalu bertumpu pada figur pimpinan bukan kepada pengembangan kapasitas personal sehingga tidak ada inisiatif untuk meningkatkan kapasitas diri (Lakip Kabupaten Tasikmalaya, 2015).

Dibandingkan dengan sebelum pemekaran, SDM di Kabupaten Tasikmalaya jauh lebih baik pasca pemekaran. Hal ini dikarenakan ada penambahan SDM baru setelah dibagi antara Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Tasikmalaya, walaupun memang SDM sekarang masih belum begitu maksimal dalam menjalankan tugas sebagai perencana pembangunan di daerah Kabupaten Tasikmalaya (Wawancara, 3 Maret 2017). Sebelum adanya pemekaran SDM di Tasikmalaya masih menjadi satu

dan banyak, setelah itu pasca pemekaran dibagi menjadi dua dan kebanyakan dibagi ke Kota Tasikmalaya ((Wawancara, 3 Maret 2017). Sehingga, salah satu penghambat pembangunan daerah di Kabupaten Tasikmalaya adalah SDM yang kurang memadai dalam mengimplementasikan perencanaan pembangunan daerah.

Pada dasarnya manusialah yang menjadi pelaku dan penentu. SDM seperti apa yang diperlukan, yaitu SDM yang memiliki: moral yang baik (*good morality*), kemampuan kepemimpinan (*leadership*), kemampuan manajerial (*managerial skill*), dan kemampuan teknis (*technical skill*). Seorang kepala daerah perlu didukung oleh aparat yang mempunyai empat kualifikasi tersebut, diberbagai level jabatan dan fungsinya. Maka dari itu, kompetensi yang handal SDM dalam perencanaan hingga evaluasi pembangunan daerah sangat diperlukan. Kompetensi meliputi, kompetensi teknik (*technical competence*) yaitu kompetensi mengenai bidang yang menjadi tugas pokok organisasi. Definisi yang sama dimuat dalam PP no 101/2000 tentang Diklat Jabatan PNS, bahwa kompetensi teknis adalah kemampuan PNS dalam bidang teknis tertentu untuk pelaksanaan tugas masing-masing. Bagi PNS yang belum memenuhi persyaratan kompetensi jabatan perlu mengikuti Diklat teknis yang berkaitan dengan persyaratan kompetensi jabatan masing-masing. Hal ini sama halnya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, terutama pada BAPPEDA nya.

Selanjutnya adalah kompetensi manajerial (*managerial competence*) adalah kompetensi yang berhubungan dengan berbagai kemampuan manajerial yang dibutuhkan dalam menangani tugas organisasi. Kompetensi manajerial meliputi

kemampuan menerapkan konsep dan teknik perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi kinerja unit organisasi, juga kemampuan dalam melaksanakan prinsip *good governance* dalam manajemen pemerintahan dan pembangunan termasuk bagaimana mendayagunakan kemanfaatan sumberdaya pembangunan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dalam perencanaan hingga evaluasi pembangunan daerah di Kabupaten Tasikmalaya.

Kompetensi sosial (*Social Competence*), yaitu kemampuan melakukan komunikasi yang dibutuhkan oleh organisasi dalam pelaksanaan tugas pokoknya. Kompetensi sosial dapat terlihat di lingkungan internal seperti memotivasi SDM dan atau peran serta masyarakat guna meningkatkan produktivitas kerja, atau yang berkaitan dengan lingkungan eksternal seperti melaksanakan pola kemitraan, kolaborasi dan pengembangan jaringan kerja dengan berbagai lembaga dalam rangka meningkatkan citra dan kinerja organisasi, termasuk bagaimana menunjukkan kepekaan terhadap hak asasi manusia, nilai-nilai sosial budaya dan sikap tanggap terhadap aspirasi dan dinamika masyarakat.

Kompetensi intelektual/strategik (*intellectual/strategic competence*), yaitu kemampuan untuk berpikir secara strategis dengan visi jauh ke depan. Kompetensi intelektual ini meliputi kemampuan merumuskan visi, misi, dan strategi dalam rangka mencapai tujuan organisasi sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, merumuskan dan memberi masukan untuk pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang logis dan sistematis, juga kemampuan dalam hal memahami paradigma

pembangunan yang relevan dalam upaya mewujudkan *good governance* dan mencapai tujuan berbangsa dan bernegara, serta kemampuan dalam menjelaskan kedudukan, tugas, fungsi organisasi instansi dalam hubungannya dengan Sistem Administrasi daerah maupun Negara.

Dalam menjalankan pembanguana daerah, pegawai atau sumber daya manusia tidak mengalami rotasi jabatan atau pegawai. Artinya bahwa pemerintah terutama pegawai BAPPEDA berpendapat bahwa dengan tidak adanya rotasi pegawai dalam suatu bidang maka akan lebih terfokus dan semakin berkompeten dalam menjalankan pembangunan daerah. Staff BAPPEDA bagian program menambahkan bahwa tidak adanya rotasi pegawai menurut beliau adalah tindakan yang tepat, sebab ketika dilakukan rotasi pegawai yang ditakutkan adalah mereka harus belajar lagi, baik itu dari cara kerja dan tupoksinya, sehingga hal tersebut tidak efektif dan dipandang tidak tepat untuk menjalankan suatu pembangunan daerah (Rosi, 2017).

Dari hasil wawancara dan olah data dalam aspek SDM, menurut Bintoro (1988) yang menjadi aspek penting dalam SDM adalah kuantitas dan kualitas. Begitu juga di Kabupaten Tasikmalaya, dalam aspek sumber daya manusia di BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya secara kuantitas sudah memadai dan mencukupi. Akan tetapi, dalam aspek kualitas belum dapat dikatakan optimal atau berkapasitas karena minimnya pengetahuan pegawai dan kurangnya minat pegawai untuk memperbaharui diri sehingga dapat dikatakan hanya monoton menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya.

Maka dari itu, dalam melihat keberhasilan pembangunan daerah menurut teori dari Bintaro (1988) implementasinya kedua aspek tersebut belum maksimal dijalankan.

## **2. Sistem Pembangunan Daerah yang Digunakan**

Sistem perencanaan yang digunakan adalah aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang digunakan oleh suatu daerah atau wilayah tertentu sebagai dasar atau landasan pelaksanaan perencanaan pembangunannya. Kebijakan pembangunan daerah dapat dilihat melalui strategi dasar pembangunan daerah (Grand strategy, 2005-2025). Strategi dasar pembangunan dapat dijalankan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat yang menjadi sasaran aktivitas pembangunan daerah, dengan prinsip sebagai berikut:

1. Pembangunan dengan tindakan penguatan (*affirmative action*) untuk menjamin hak masyarakat atas pembangunan, artinya pembangunan yang berorientasi mengurangi keterbelakangan masyarakat dengan pendekatan sesuai kondisi dan budaya masyarakat setempat.
2. Pembangunan yang partisipatif, yang artinya setiap perencanaan dan pelaksanaan maupun evaluasi program pembangunan daerah dapat melibatkan seluruh stakeholder yaitu tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lembaga agama, perguruan tinggi dan pemerintah itu sendiri.
3. Perencanaan pembangunan yang berorientasi pada program dan pencapaian hasil, yang artinya setiap program pembangunan yang dilaksanakan harus



dapat diukur dan dapat dilihat manfaatnya serta dapat dinikmati oleh masyarakat.

4. Pelaksanaan program pembangunan daerah dengan pola umpan balik (feedback) artinya bahwa program yang dilaksanakan harus ditindaklanjuti dengan dialog terbuka, untuk mengetahui apa kemauan dari masyarakat dan bagaimana seharusnya dilaksanakan.
5. Pelaksanaan Pembangunan ditempuh melalui 5 pendekatan yang sejak lama telah dilakukan di beberapa daerah, yaitu : a). Pendekatan Makro Sektoral yaitu mekanisme sistem perencanaan secara *top down planning* dan *bottom up planning* guna mengakomodir pembangunan dalam segala bidang kewenangan; b). Pendekatan Mikro Spacial (kewilayahan) yakni pembangunan dilakukan berdasarkan Wilayah Pengembangan (WP) untuk mempercepat pembangunan daerah sesuai tata ruang dan potensi daerah yang dimiliki. c) Pendekatan Agama (*Religijs Approach*), d). Pendekatan Sosial Budaya (*Sosio Cultural Approach*) dan e). Pendekatan Hukum (*Low Approach*).

Sistem atau peraturan yang digunakan di Kabupaten Tasikmalaya untuk menjalankan pembangunan daerah adalah RPJMD (Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah) pada tahun 2011-2015, RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) untuk periode satu tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaanya, baik yang

dilaksanakan oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat; dan Renstra (Rencana Strategis) Tahun 2011-2015, Penyelenggaraan urusan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah secara eksplisit tercantum dalam RPJPD 2005-2025 Kabupaten Tasikmalaya, secara implisit kedudukan BAPPEDA untuk penyelenggaraan program perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dinyatakan dalam RPJMD. Program RPJMD yang termasuk urusan lingkup BAPPEDA perlu dituangkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang kemudian dikristalkan menjadi Visi dan Misi BAPPEDA dalam Rencana strategis (Renstra) BAPPEDA. Penyusunan kegiatan perlu memperhatikan kedudukan dalam urusan, evaluasi kegiatan RPJMD sebelumnya, proyeksi lima tahun ke depan, skala prioritas dan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sehingga rencana strategis BAPPEDA yang dirumuskan dapat efektif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, dan berkelanjutan.

Prioritas pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya adalah program pembangunan yang berpihak kepada masyarakat perdesaan melalui suatu “**Gerakan Bangun Desa (Gerbang Desa)**” Kabupaten Tasikmalaya. Program Gerbang Desa ini diharapkan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Tasikmalaya akan kembali pulang ke desa untuk membangun desa, dalam arti memprioritaskan pembangunan perdesaan untuk menjadi Kabupaten Tasikmalaya yang maju dan sejahtera. Gerakan Bangun Desa (Gerbang Desa), ada 5 (lima) program prioritas yang akan dilaksanakan, yaitu :

1. Peningkatan kesejahteraan, petani, buruh tani, nelayan dan aparatur desa

Peningkatan kesejahteraan, petani, buruh tani, nelayan dan aparatur desa menjadi prioritas karena mayoritas penduduk Kab. Tasikmalaya adalah petani buruh tani, dan nelayan.

2. Peningkatan jalan Desa

Membangun atau memperbaiki prasarana jalan akan menciptakan atau memperbaiki kehidupan masyarakat. Dengan adanya pembangunan prasarana jalan, masyarakat dapat menggunakan jalan tersebut dengan berbagai kebutuhan yang mereka perlukan, seperti melakukan mobilitas, pemasaran hasil pertaniannya, mengangkut hasil pertanian agar lebih mudah dan lain sebagainya.

3. Listrik Masuk Desa

Pendidikan merupakan kebutuhan yang mendasar bagi anak-anak guna mempersiapkan masa depan mereka yang lebih baik. Namun pendidikan tidak serta-merta diperoleh dengan mudah khususnya bagi mereka yang memiliki ekonomi kelas menengah kebawah. Selain itu, pendidikan juga sulit didapat oleh mereka yang tinggal di daerah pedesaan terpencil. Apalagi jika ditambah dengan kondisi desa yang memprihatinkan tanpa adanya listrik yang dapat mendukung pendidikan bagi anak-anak. Desa tanpa listrik layaknya desa tak bernyawa. Listrik sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa untuk menunjang kegiatan mereka sehari-hari

4. Irigasi, air bersih perdesaan dan sanitasi lingkungan perdesaan

Yang paling utama adalah untuk membangun infrastruktur dan pembangunan sarana prasarana desa. Pos tersebut meliputi pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani, pengembangan dan pemeliharaan embung desa, pembangunan energi baru terbarukan, pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan, pembangunan dan pemeliharaan air bersih berskala desa, pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier, pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan, dan pembangunan sarana prasarana produksi di desa.

#### 5. Telekomunikasi dan informasi masuk desa

Pembangunan Telekomunikasi dan Informasi bagi masyarakat memang dianggap akan memberikan perubahan-perubahan mendasar, terutama peningkatan kualitas kehidupan. Telekomunikasi dan Informasi dianggap sebagai pemberdayaan bagi individual. Keinginan mewujudkan masyarakat modern yang tidak tertinggal dengan kondisi globalisasi, mendorong pemerintah untuk berupaya memajukan kualitas kehidupan warga negaranya melalui program-program pembangunan teknologi informasi hingga ke pelosok desa. Tujuannya adalah selain memberikan akses murah terhadap Telekomunikasi dan Informasi juga mengenalkan penggunaan Telekomunikasi dan Informasi untuk perubahan kehidupan dan pertumbuhan ekonomi di daerah pelosok pedesaan.

Pelaksanaan kelima program prioritas tersebut diharapkan akan mempunyai efek berantai terhadap tingkat kesehatan, pendidikan, dan perekonomian masyarakat perdesaan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian, isu-isu strategis di Kabupaten berusaha untuk menjaring permasalahan-permasalahan di setiap daerah di Kabupaten Tasikmalaya sehingga didapatkan 14 isu strategis yang akan menjadi program pembangunan daerah. Berikut adalah rincian indikator setiap permasalahan pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya:

1) Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

a. Bidang Kependudukan

Dalam bidang kependudukan, beberapa permasalahan yang masih perlu ditangani antara lain;

- 1) Pengendalian laju pertumbuhan penduduk;
- 2) Penataan administrasi kependudukan;
- 3) Penguatan kelembagaan kependudukan; dan
- 4) Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya akta-akta pencatatan sipil.

b. Bidang Pendidikan

Di bidang pendidikan beberapa permasalahan mendasar yang memerlukan penanganan segera mencakup:

- 1) Keterbatasan akses masyarakat terhadap pendidikan menengah dan tinggi;

- 2) Masih rendahnya akuntabilitas pengelolaan pendidikan
- 3) Belum adanya SPM Pendidikan.

c. Bidang Kesehatan

Permasalahan bidang kesehatan, antara lain:

- 1) Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan dasar dan rujukan, tenaga kesehatan, dan jaminan pembiayaan kesehatan;
- 2) Derajat kesehatan dan status gizi masyarakat masih rendah, yang antara lain tercermin dari masih tingginya Angka kematian bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI), serta masih tingginya angka kesakitan dan kematian yang diderita oleh masyarakat, baik berupa penyakit menular maupun penyakit tidak menular;
- 3) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan Perilaku Hidup Bersih & Sehat (PHBS).
- 4) Belum mempunyai Rumah Sakit Umum Daerah yang memadai.

d. Bidang Ketenagakerjaan;

Permasalahan pembangunan dalam bidang tenaga kerja yang sangat krusial antara lain:

- 1) Tingginya angka pengangguran terbuka;
- 2) Terbatasnya kapasitas kelembagaan, sarana dan prasarana pelatihan serta terbatasnya paket kegiatan bimbingan usaha.

e. Bidang Olah Raga dan Kepemudaan :

Permasalahan pembangunan keolahragaan saat ini antara lain:

- 1) Pembinaan olahraga yang belum terpadu antara olahraga pendidikan di lingkungan persekolahan, olahraga rekreasi di lingkungan masyarakat, dan olahraga prestasi untuk kelompok atlet;
- 2) Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri.

f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :

- 1) Terbatasnya akses terhadap kesempatan usaha, pendidikan, dan kesehatan.
- 2) Makin meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga, serta belum optimalnya peran lembaga sosial masyarakat terhadap perlindungan perempuan dan anak.

g. Bidang Kebudayaan :

Permasalahan dalam pengembangan bidang kebudayaan antara lain:

- 1) Rendahnya ketahanan budaya masyarakat akibat imbas perubahan global.
- 2) Pemahaman masyarakat tentang arti penting kebudayaan dalam kehidupan belum berkembang dengan baik
- 3) Proses regenerasi dalam rangka pewarisan budaya daerah masih rendah
- 4) Belum termanfaatkannya produk budaya sebagai potensi industri kreatif.

h. Bidang Sosial :

Permasalahan bidang sosial adalah :

- 1) Kecenderungan peningkatan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

- 2) Perselisihan akibat dari konflik antar/inter pemeluk agama;
- 3) Terbatasnya sarana dan prasarana, sumberdaya manusia dan anggaran pemerintah untuk penanganan masalah-masalah sosial.

i. Bidang Keagamaan:

Dalam bidang keagamaan, permasalahan yang masih dihadapi di Kabupaten Tasikmalaya antara lain :

- 1) Perlu adanya kurikulum dan mata pelajaran agama yang proporsional dalam pendidikan dasar dan menengah.
- 2) Belum optimalnya peran lembaga-lembaga keagamaan dalam kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat.

2) Ekonomi

a. Bidang Investasi dan Penanaman Modal :

Permasalahan dalam bidang investasi dan penanaman modal anatara lain:

- 1) Kondisi infrastruktur yang ada dirasakan masih terbatas.
- 2) Prosedur perizinan masih berbelit-belit.
- 3) Kajian potensi dan peluang investasi yang dapat ditawarkan kepada investor masih terbatas.
- 4) Belum optimalnya peran KADIN.

b. Bidang Pertanian :

Kendala dalam pengembangan pertanian secara umum mencakup, antara lain:

- 1) Rendahnya tingkat kesejahteraan petani yang diakibatkan :



- Pada umumnya petani sebagai buruh tani
- Tingkat kepemilikan lahan petani relatif terbatas (kurang dari 0,5 Ha)
- Skala usaha pertanian relatif terbatas.

- 2) Pengembangan pertanian masih bersifat parsial pada sistem pertanian;
- 3) Input produksi pertanian relatif terbatas pada umumnya disebabkan masih lemahnya kemampuan finansial untuk pengembangan usaha.
- 4) Terbatasnya kuantitas dan kualitas infrastruktur pertanian
- 5) Penerapan teknologi tepat guna masih terbatas diakibatkan oleh terbatasnya sarana prasarana, rendahnya SDM petani, terbatasnya penyuluh pertanian dan tenaga teknis lainnya.
- 6) Alih fungsi lahan pertanian yang mengurangi produksi dan produktivitas hasil pertanian.
- 7) Masih terbatasnya sarana dan prasarana panen dan pasca panen
- 8) Masih rendahnya kualitas produk yang dihasilkan
- 9) Kelembagaan kelompok tani belum mandiri
- 10) Nilai Tambah hasil pertanian yang masih rendah disebabkan produk yang dijual masih berupa bahan mentah belum melalui proses pengolahan dan pengemasan.
- 11) Rendahnya nilai tukar petani (NTP).
- 12) Masih lemahnya akses permodalan sehingga mengakibatkan sistem ijon di petani
- 13) Belum konsistennya pelaksanaan Sistem Pertanian Organik.

14) Masih lemahnya penelitian untuk menghasilkan bibit dan produk unggulan

Permasalahan dalam Sub-Bidang Pertanian Tanaman Pangan :

- 1) Masih belum adanya kawasan tanaman hortikultura baik sayuran maupun buah-buahan,
- 2) Belum terintegrasinya tanaman dan ternak dalam penyediaan bahan pupuk organik,
- 3) Belum disertifikasinya produksi buah-buahan lokal

Permasalahan dalam Sub-Bidang Peternakan:

- 1) Masih terbatasnya produksi daging.
- 2) Masih terbatasnya populasi hewan.
- 3) Dalam hal prasarana dan sarana, kondisi Rumah Potong Hewan, Pasar Hewan, Unit Perbibitan Ternak masih jauh dari memadai.
- 4) Terbatasnya jumlah tenaga teknis lapangan (penyuluh, paramedic veteriner dan dokter hewan).
- 5) Terbatasnya akses peternak terhadap pendanaan.

Permasalahan dalam Sub-bidang Perikanan yaitu :

- 1) Berkurangnya kualitas, kuantitas, dan debit air di sentra perikanan air tawar.
- 2) Masih rendahnya produksi budidaya perikanan air tawar, khususnya ikan gurame, ikan nilam dan udang galah.
- 3) Belum adanya pusat pembenihan ikan nilam.

Permasalahan dalam Sub-Bidang Kehutanan yaitu :

- 1) Laju deforestasi tidak seimbang jika dibandingkan dengan upaya rehabilitasi hutan dan lahan.
- 2) Tidak terkendalinya penebangan hutan yang dilakukan oleh pemilik
- 3) Masih lemahnya penegakan aturan dalam tata usaha hasil hutan

Dalam Sub-Bidang Perkebunan yaitu :

- 1) Masih rendahnya tingkat produktifitas
- 2) Harga jual yang fluktuatif.

Sub-Bidang Ketahanan Pangan :

- 1) Masih rendahnya ketersediaan cadangan pangan khususnya beras dan jagung pada saat musim paceklik.
- 2) Rendahnya tingkat kemandirian pangan di desa kategori miskin.
- 3) Masih terbatasnya fasilitasi lumbung pangan perdesaan.

c. Bidang Kelautan :

- 1) Belum terpadunya pengelolaan kegiatan wilayah pesisir pantai selatan Tasikmalaya.
  - 2) Terbatasnya sarana dan prasarana tangkapan ikan.
  - 3) Pemasalahan pengembangan komoditas kelautan berkaitan dengan investasi yang memerlukan dana sangat besar.
- 3) Bidang Pertambangan :

Permasalahan yang dihadapi dalam bidang pertambangan adalah:

- 1) Pemanfaatan potensi pertambangan belum memberikan nilai tambah.
  - 2) Eksploitasi bahan tambang yang tidak terkendali
  - 3) Belum adanya peta sebaran potensi pertambangan
  - 4) Lemahnya pengawasan dan pengendalian eksploitasi pertambangan
- d. Bidang Pariwisata, Kendala yang masih dihadapi dalam pengembangan sektor pariwisata antara lain :
- 1) Fasilitas dan pelayanan wisata yang ada di Kabupaten Tasikmalaya belum cukup memadai.
  - 2) Masih rendahnya minat swasta untuk mengelola potensi pariwisata.
  - 3) Belum optimalnya penyebaran informasi dan promosi pariwisata
- e. Bidang Koperasi, Industri Kecil dan Menengah
- Tasikmalaya sebagai tempat lahirnya koperasi di Indonesia masih mempunyai permasalahan dalam pengembangan koperasi antara lain:
- 1) Rendahnya manajemen usaha koperasi,
  - 2) Terbatasnya permodalan koperasi,
  - 3) Rendahnya kualitas SDM pengelola koperasi

Pengembangan industri kecil dan menengah Kabupaten Tasikmalaya di arahkan untuk pengembangan industri kreatif yaitu kerajinan dan bordir. Meskipun demikian, dalam pengembangannya masih menghadapi permasalahan antara lain :

- 1) Masih rendahnya manajemen pengelolaan usaha.

- 2) Kontinuitas produk kurang terjamin, terutama berkaitan dengan pasokan bahan baku.
- 3) Terbatasnya akses permodalan
- 4) Jaringan informasi dan akses pasar ke tingkat nasional maupun internasional masih lemah.
- 5) Kurangnya diversifikasi dan tingkat kreativitas desain produk.

f. Bidang Perdagangan :

Permasalahan yang masih dihadapi dalam bidang perdagangan, yaitu :

- 1) Masih kurangnya fasilitasi pemerintah daerah dalam perdagangan ekspor
- 2) Masih lemahnya tata niaga perdagangan antar daerah dan ekspor
- 3) Terbatasnya sarana dan prasarana distribusi perdagangan (Pasar)
- 4) Terbatasnya sarana promosi

4) Infrastruktur Wilayah

a. Bidang Pekerjaan Umum

Kabupaten Tasikmalaya memiliki jaringan jalan sepanjang 1.303,323 km, dari panjang jalan tersebut terdapat sepanjang 340,855 km dalam kondisi baik, 270,958 km dalam kondisi sedang, 269,635 km dalam kondisi rusak, dan 421,875 Km dalam kondisi rusak berat. Permasalahan mendasar pada infrastruktur transportasi antara lain :

- 1) Masih banyaknya pengguna jasa jalan melebihi tonase yang telah ditentukan

- 2) Rendahnya kemantapan jalan pada sistem jaringan jalan di Kabupaten Tasikmalaya
- 3) Rendahnya optimalisasi fasilitas terminal angkutan penumpang
- 4) Cakupan pelayanan jaringan jalan belum bisa optimal melayani masyarakat
- 5) Sistem jaringan jalan yang ada belum bisa mengimbangi pergerakan barang dan orang

Adapun permasalahan pada aspek infrastruktur sumber daya air dan irigasi, antara lain:

- 1) Rusaknya infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang disebabkan oleh terjadinya bencana alam;
- 2) Rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam memelihara infrastruktur yang ada; dan
- 3) Belum memadainya infrastruktur sumber daya air dan irigasi dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat.

b. Bidang Energi dan Kelistrikan :

Permasalahan pada aspek infrastruktur listrik dan energi adalah:

- 1) Cakupan elektrifikasi di Kabupaten Tasikmalaya baru mencapai 59,25% yang bersumber dari PLN dan Non PLN
- 2) Masih terbatasnya penyediaan sumber-sumber energi alternatif seperti Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) mikro hidro, biogas, tenaga surya, dan tenaga angin.

c. Bidang Telekomunikasi :

Pada bidang telekomunikasi, permasalahan yang dihadapi adalah :

- 1) Masih terbatasnya cakupan layanan untuk infrastruktur telekomunikasi kabel.
- 2) Terbatasnya akses dan kemampuan masyarakat menikmati layanan telekomunikasi nirkabel.

d. Bidang Permukiman dan Perumahan :

Permasalahan mendasar di sektor infrastruktur air minum dan air bersih meliputi :

- 1) Masih rendahnya cakupan pelayanan air minum PDAM
- 2) Masih tingginya tingkat kebocoran air minum PDAM.
- 3) Belum sesuai kapasitas terpasang dengan kapasitas produksi infrastruktur yang ada;
- 4) Belum termanfaatkannya sumber-sumber air baku baru;
- 5) Masih rendahnya cakupan air bersih khususnya untuk masyarakat perdesaan.

Permasalahan yang ada pada infrastruktur pengolahan limbah domestik meliputi :

- 1) Belum seimbang penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik dengan pertumbuhan penduduk;
- 2) Rendahnya kepedulian masyarakat dan swasta/dunia usaha terhadap bidang kesantitasian;
- 3) Belum adanya Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT)

Untuk aspek perumahan, permasalahan yang mendasar adalah :

- 1) masih adanya ketimpangan antara ketersediaan perumahan dengan kebutuhan perumahan (*backlog*).
- 2) masih banyaknya rumah tidak layak huni di perdesaan.

#### 5) Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan acuan dasar dalam kerangka pengembangan wilayah. Belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang berkenaan dengan :

##### 1. Pengaturan

- Keterbatasan sumber daya manusia dalam melaksanakan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang;
- Belum adanya dokumen RDTR untuk semua kawasan strategis dan kawasan cepat tumbuh serta kawasan potensial

##### 2. Pembinaan

- Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap rencana tata ruang.
- Belum optimalnya sosialisasi dan diseminasi mengenai perencanaan tata ruang

##### 3. Pelaksanaan

- Masih tingginya peta konflik antara peta struktur ruang dan pola ruang
- Kondisi fisik dasar Kabupaten Tasikmalaya yang merupakan daerah rawan bencana secara tidak langsung membatasi peruntukan kawasan budidaya;



- Masih ditemuinya pengembangan wilayah sektoral yang tidak mengacu pada dokumen tata ruang yang ada;
- Pengawasan: adanya alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan pola ruang;

Adapun permasalahan yang dihadapi pada bidang pertanahan adalah:

- 1) Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap identitas kepemilikan tanah
- 2) Masih banyaknya lahan tidur
- 3) Masih adanya konflik pemilikan tanah diantara masyarakat

#### 6) Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Tasikmalaya terakhir kurang menggambarkan keseimbangan lingkungan hidup yang baik, antara lingkungan ekosistem alami dengan lingkungan ekosistem budidaya/buatan manusia. Terjadinya kerusakan lingkungan dan sumberdaya alam disebabkan beberapa faktor, diantaranya :

- 1) kegiatan pertambangan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 2) pembangunan yang tidak sesuai tata ruang;
- 3) kerusakan hutan atau deforestasi akibat penebangan yang tidak terkendali

Permasalahan yang dihadapi dalam bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup antara lain :

- 1) Luas eksisting kawasan lindung masih belum mencapai target yang ditetapkan dalam RTRW Propinsi Jawa Barat, yaitu 64,32 % dari total luas wilayah.
- 2) Adanya degradasi pantai yang disebabkan abrasi baik oleh faktor alam maupun manusia.

Adapun permasalahan persampahan di Kabupaten Tasikmalaya antara lain:

- 1) Belum ada Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan persampahan
- 2) Kurangnya sarana dan prasarana operasional persampahan
- 3) Kurangnya pegawai yang mengelola persampahan
- 4) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan
- 5) Pengelolaan sampah di TPA masih menggunakan cara-cara *open dumping*.

## 7) Politik

Perkembangan kehidupan demokrasi perlu ditunjang dengan penguatan institusi politik dan peningkatan pendidikan politik bagi masyarakat. Partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi belum berperan secara maksimal. Permasalahan lain yang dihadapi dalam bidang politik antara lain :

- 1) Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga politik
- 2) Partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pengambilan kebijakan publik masih rendah.

- 3) Lembaga politik belum memberikan secara maksimal proses peningkatan kesadaran politik warga (pendidikan politik).

## 8) Hukum

Permasalahan Pembangunan Bidang Hukum antara lain :

- 1) Belum adanya grand design tentang pembuatan program legislasi daerah
- 2) Belum optimalnya kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia di bidang hukum
- 3) Masih rendahnya budaya hukum masyarakat.

## 9) Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Permasalahan yang dihadapi dalam bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat antara lain :

- 1) Meningkatnya potensi konflik kepentingan dan pengaruh negatif arus globalisasi yang penuh keterbukaan,
- 2) Menurunnya wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara.
- 3) Berkembangnya modus-modus kejahatan baru dengan memanfaatkan teknologi canggih dan maraknya kasus-kasus kerusuhan dan berbagai kejahatan yang bersifat konvensional, transnasional, dan kejahatan terhadap kekayaan Negara.
- 4) Adanya tindakan-tindakan kelompok masyarakat yang bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku.

5) Masih tingginya tingkat kriminalitas di masyarakat.

#### 10) Aparatur dan Pelayanan Publik

Permasalahan yang masih ada dalam pembangunan Bidang Aparatur dan pelayanan publik antara lain:

- 1) Kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya berdasarkan prinsip organisasi yang efektif dan efisien, sehingga struktur organisasi kurang proporsional.
- 2) Sistem manajemen kepegawaian belum mampu mendorong peningkatan profesionalitas, kompetensi, dan remunerasi yang adil dan layak sesuai dengan tanggungjawab dan beban kerja.
- 3) Sistem dan prosedur kerja serta pelayanan publik di lingkungan aparaturnya daerah masih perlu ditingkatkan sejalan dengan tuntutan dan harapan masyarakat melalui peningkatan nilai-nilai etika dan budaya kerja, disiplin kerja, etos kerja, serta produktivitas kerja.
- 4) Masih rendahnya sarana dan prasarana pemerintahan
- 5) Penempatan pegawai belum sesuai dengan kompetensi pegawai

#### 11) Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah diarahkan untuk terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan dengan asas-asas pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Permasalahan yang masih dihadapi dalam bidang Keuangan daerah dan Pengelolaan asset daerah antara lain :

- 1) Capaian laporan kinerja keuangan yang masih pada level Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
- 2) Pendataan aset yang belum terselesaikan dan adanya aset-aset yang belum tersertifikasi.
- 3) Masih adanya bantuan keuangan dari pemerintah pusat dan provinsi yang dalam pembagiannya tidak proporsional dan cenderung disamaratakan dengan pemerintah kabupaten/kota lainnya.
- 4) Belum proporsionalnya belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## 12. Pemerintahan dan Pembangunan Desa

Permasalahan yang dihadapi dalam bidang pemerintahan desa antara lain :

- 1) Masih rendahnya sumber daya aparatur pemerintahan desa dalam tata kelola pemerintahan desa.
- 2) Terbatasnya tingkat kesejahteraan aparatur pemerintahan desa.
- 3) Belum optimalnya peran lembaga desa dan lembaga masyarakat desa
- 4) Masih terbatasnya prasarana dan sarana pendukung penyelenggaraan pemerintah desa.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam bidang pembangunan desa antara lain :

- 1) Masih terbatasnya infrastruktur dasar perdesaaan

- 2) Menurunnya nilai-nilai gotong royong masyarakat dalam gerakan pembangunan desa.

### 13. Penanggulangan Bencana

Berdasarkan Indeks Rawan Bencana Nasional, Kabupaten Tasikmalaya menempati ranking kedua nasional sebagai daerah rawan bencana. Permasalahan yang dihadapi adalah;

- 1) Masyarakat belum sadar bencana dan lemah menghadapi bencana.
- 2) Lemahnya kapasitas dan kelembagaan BPBD.
- 3) Belum tersosialisasikannya peta rawan bencana
- 4) Terbatasnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana

### 14. Isu Strategis Kewilayahan

Berdasarkan tinjauan kewilayahan dari potensi ekonomi dan sosial, terdapat indikasi bahwa perkembangan wilayah dan kota-kota di bagian Utara dan Tengah lebih cepat dibandingkan dengan wilayah dan kota-kota di bagian Selatan Kabupaten Tasikmalaya. Ketidakmerataan terutama karena :

- 1) Belum termanfaatkannya secara optimal potensi produksi yang berada di bagian Selatan.
- 2) Keadaan geografis wilayah bagian Selatan yang menyebabkan belum berkembangnya bagian wilayah Selatan.

3) Kondisi fisik dasar yang tidak menunjang untuk pengembangan pertanian.

Hasil pembangunan yang telah dicapai selama ini merupakan modal dasar dan sebagai kekuatan serta peluang untuk meningkatkan pembangunan selanjutnya. Tasikmalaya memiliki potensi sumberdaya alam yang sudah banyak dimanfaatkan, namun demikian potensinya belum secara optimal dapat dikembangkan termasuk di dalamnya sumberdaya pertanian, pertambangan, perindustrian dan pariwisata. Untuk meningkatkan pemanfaatan potensi yang ada, perlu didukung pembangunan infrastruktur dasar yang memadai, diantaranya jalan, jembatan, sumber daya air dan energi listrik.

Selama ini acuan untuk menjalankan pembangunan daerah adalah dari RPJPD, RPJMD Tahun 2011-2015, kemudian diturunkan kedalam rencana tahunan yaitu RKPD. Selain hal tersebut peraturan-peraturan bupati juga digunakan sebagai pertimbangan untuk menjalankan program pembangunan daerah, sebagaimana yang dikatakan oleh staff divisi program pada BAPPEDA, ibu Rosi yang menyatakan bahwa:

“Perencanaan pembangunan daerah didasarkan dan mengacu pada RPJP Daerah, kemudian diturunkan menjadi RPJMD 2011-2015, kemudian diturunkan lagi menjadi rencana kerja tahunan, selain hal tersebut ada beberapa pertimbangan lain untuk menjalankan program pembangunan yaitu peraturan yang dikeluarkan oleh bupati di Tasikmalaya, ya jadi gitu” (Wawancara pada tanggal 03 Maret 2017).

RPJMD Kabupaten Tasikmalaya diperkuat dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2011 dengan perubahan menjadi Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian, dalam Penyusunan Rencana strategis BAPPEDA mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penyusunan Rencana strategis BAPPEDA dilakukan melalui keterlibatan semua pemangku kepentingan di BAPPEDA baik unsur pimpinan, unsur staf sekretariat maupun unsur pelaksana bidang.

RPJMD Kabupaten Tasikmayala tetap sama dengan sebelum adanya pemekaran. Setelah pemekaran daerah yang membedakan hanyalah prioritas pembangunan antara Kabupaten Tasikmalaya dengan Kota Tasikmalaya. Prioritas pembangunan di Tasikmalaya berfokus pada pembangunan desa sementara di Kota Tasikmalaya adalah lebih kepada daya saing daerah yang mengedepankan infrastruktur untuk pelayanan publik (Wawancara, 3 Maret 2017).

Kemudian, pembangunan daerah menurut Bintaro (1988) menyatakan salah satu keberhasilan pembangunan daerah adalah dengan adanya partisipasi masyarakat dan stakeholder seperti LSM, lembaga masyarakat, tidak hanya pemerintah saja. Di Kabupaten Tasikmalaya, pada perencanaan pembangunan daerah sudah melibatkan seluruh stakeholder yang ada atau partisipasi masyarakat sudah dicapai dengan adanya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG) di setiap desa yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. MUSREMBANG ini dilakukan agar pembangunan daerah



di Kabupaten Tasikmalaya berbasis kepada masyarakat, bukan merupakan kepentingan pemerintah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Rosi selaku pegawai bagian program yang menyatakan bahwa:

“kalau masyarakat partisipasinya dapat dilihat dari keikutsertaan dalam musrembang. Jadi sebelum menentukan arah kebijakan daerah untuk pembangunan daerah pasti ada musrembang dulu untuk menyerap aspirasi masyarakat, dari situ kita tahu manakah yang akan menjadi prioritas pembangunan daerah. Sehingga prioritas pembangunan daerah ya betul-betul datang dari masyarakat bukan kepentingan pemangku jabatan”. (Wawancara pada tanggal 3 Maret 2017)

Jadi, dapat disimpulkan bahwa sistem pembangunan atau kebijakan yang digunakan di Kabupaten Tasikmalaya sudah sesuai dengan arah pembangunan atau visi dan misi Bupati maupun Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sendiri. Kebijakan dan peraturan-peraturannya pada tahun 2011-2015 diturunkan menjadi 14 prioritas pembangunan daerah. Kemudian pembangunan daerah di Kabupaten Tasikmalaya sudah berbasis pada *society oriented* dimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah sangat diutamakan di Kabupaten Tasikmalaya guna mengetahui persoalan-persoalan apa yang dihadapi masyarakat, sehingga pemerintah tahu prioritas pembangunan daerah sesuai dengan keinginan masyarakat. Pada hakikatnya masyarakatlah yang memang mengetahui dan memahami persoalan-persoalan detail terkait dengan daerah, kemudian pemerintah berusaha untuk memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan tersebut salah satunya dengan adanya prioritas pembangunan daerah dan juga kebijakan yang diambil.

### **3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)**

Pemanfaatan IPTEK dalam pembangunan daerah sangat mendukung dalam melaksanakan pembangunan daerah, IPTEK yang dapat diakses oleh SDM sangat mendorong untuk mencari informasi maupun data terkait dengan pengembangan pembangunan daerah (Siagan, 1995). Sehingga, teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran sangat mempengaruhi laju percepatan pembangunan daerah.

Pembangunan IPTEK merupakan sumber terbentuknya iklim inovasi yang menjadi landasan bagi tumbuhnya kreativitas sumberdaya manusia (SDM), yang nantinya dapat menjadi sumber pertumbuhan pembangunan suatu daerah. Selain itu IPTEK menentukan tingkat efektivitas dan efisiensi proses transformasi sumberdaya menjadi sumberdaya baru yang lebih bernilai agar nantinya dapat mendukung proses pembangunan di Daerah maupun secara Nasional. Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) pada hakekatnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka membangun peradaban bangsa. Sejalan dengan paradigma baru di era globalisasi yaitu Tekno-Ekonomi (*Techno-Economy Paradigm*), teknologi menjadi faktor yang memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan kualitas hidup dan pembangunan suatu bangsa. Implikasi paradigma ini adalah terjadinya proses transisi perekonomian dunia yang semula berbasiskan pada sumber daya (*Resource Based Economy*) menjadi perekonomian yang berbasiskan pengetahuan (*Knowledge Based Economy/KBE*) guna mendukung pembangunan (RPJMN, 2011-2015).

Penggunaan Sistem Informasi di Kabupaten Tasikmalaya terutama pada BAPPEDA ada beberapa aplikasi yang biasa digunakan oleh daerah lain juga diantaranya website dan email. Namun, penggunaannya belum maksimal contohnya seperti *website* yang tidak bisa diakses karena alasan sedang adanya perbaikan, kemudian email masuk jarang dibalas oleh pegawai BAPPEDA yang menangani SIM di BAPPEDA. Sehingga dalam LAKIP Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015 disebutkan dalam kelemahan bahwa tidak merata kemampuan menggunakan perangkat teknologi yang ada (Lakip, 2015). Selain hambatan tersebut, hambatan yang lainnya adalah pengelolaan *website* di Kabupaten Tasikmalaya tidak dikerjakan oleh pegawai BAPPEDA sendiri melainkan masih menggunakan jasa orang lain diluar BAPPEDA yang menguasai *website*, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Ibu Rosi staff bagian program di BAPPEDA yaitu:

“terus itu juga sebetulnya yang kita butuh harus ada *progremers* khusus yg megang sim soalnya selama ini paling kita jadi operator aja, kalo ada masalah kita terhambat disitukan kita nyari orang yang pintar TI, nah disitulah hambatannya sebenarnya karena tidak ada staff yang ahli untuk menangani *website* itu” (Wawancara pada tanggal 3 Maret 2017).

Menurut data yang telah diperoleh, permasalahan SIM di Kabupaten Tasikmalaya yang mendominasi adalah terkait dengan SDM pegawai BAPPEDA yang kurang peka terhadap pentingnya SIM untuk mendukung proses perencanaan pembangunan daerah. Selain itu juga, pegawai atau staff BAPPEDA hanya bisa sekedar mengaplikasikan program *website* yang ada, sehingga apabila ada permasalahan pada *website* tersebut, maka pegawai tidak dapat menangani sendiri

sehingga memerlukan *programmer* dari luar BAPPEDA yang ahli dalam bidang *website* (Rosi, 2017). Hal ini tentu menjadi tidak efektif, karena dapat menghambat pembaharuan informasi BAPPEDA pada *website*, dan juga menyulitkan masyarakat yang ingin mengunjungi *website* tersebut untuk keperluan mencari data, mengontrol kinerja pemerintah, dan lain sebagainya.

Menurut Siagan (1995) pemanfaatan teknologi informasi harus tepat sasaran dan tepat guna agar mendorong pengembangan pembangunan daerah. Kemudian, pada pengaplikasiannya di Kabupaten Tasikmalaya belum maksimal dan belum tepat guna. Banyak faktor yang menyebabkan SIM di Kabupaten Tasikmalaya belum tepat guna, misalnya adalah faktor SDM yang belum sepenuhnya menerima SIM sebagai salah satu perangkat yang membantu pekerjaan mereka, dan kemudian karena SIM belum juga digunakan secara maksimal sebagai sistem yang dapat membantu pekerjaan mereka. Seharusnya hal ini tentu menjadi salah satu pokok yang penting untuk ditingkatkan. Bagaimana pemerintah terutama dalam aspek SDMnya mampu untuk mengadopsi SIM dan menggunakannya secara maksimal. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya harus memiliki cara supaya SIM dapat diterima diseluruh elemen pegawai BAPPEDA untuk membantu pekerjaan mereka terutama dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Dibandingkan dengan sebelum pemekaran, penggunaan IPTEK pada saat pemekaran lebih baik dengan adanya *website* walaupun memang sekarang masih bermasalah. Sebelum pemekaran Tasikmalaya belum mempunyai *website*, sehingga hal tersebut menghambat tentang ketersediaan informasi bagi publik.

Jadi, dari segi IPTEK yang digunakan di Kabupaten Tasikmalaya masih sangat terbatas yaitu penggunaannya hanya sebatas email dan juga *website*. Penggunaannya pun masih belum optimal karena SDM yang minim pengetahuan untuk menangani *website*, sehingga pegawai BAPPEDA hanya dapat sekedar mengoperasikannya saja.

#### **4. Pendanaan yang Digunakan Untuk Melaksanakan Pembangunan Daerah**

Faktor pendanaan pada dasarnya merupakan faktor yang sudah *given*. Artinya hal itu memang harus ada untuk melakukan suatu kegiatan atau aktivitas. Namun ada satu yang perlu disampaikan disini bahwa dalam proses perencanaan pembangunan daerah, hal ini harus benar-benar diperhatikan sebagai suatu hal yang sangat penting. Perencanaan pembangunan daerah adalah kegiatan yang mahal. Oleh Karena itu, pelaksanaannya harus benar-benar serius, dalam arti pihak-pihak yang terkait, termasuk para perencananya harus fokus terhadap tugasnya, punya komitmen terhadap tujuan yang ingin dicapai dan harus bekerja keras, teliti serta tidak terburu-buru dalam penyusunannya (Bintaro 1988).

Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah melalui UU No.22 tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.25 tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No.33 tahun 2004 yang diperbaharui dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, mengarahkan pemerintah daerah di Indonesia memasuki era baru dalam pelaksanaan sistem desentralisasi di bidang perekonomian, administrasi dan fiskal.

Oleh karena itu pemerintah daerah diharapkan dapat mengembangkan potensi daerahnya sendiri dan menggali sumber dana yang ada dan potensial guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan warga masyarakatnya.

Sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah, antara lain berasal dari dana perimbangan yang diterima oleh daerah-daerah dari pemerintah pusat termasuk juga di Kabupaten Tasikmalaya. Beberapa daerah yang kaya sumber daya alam dapat menggunakan dana bagi hasil untuk membiayai belanja pembangunannya sedangkan bagi daerah-daerah miskin dan tidak memiliki sumber daya alam, belanja pembangunannya masih akan tergantung pada jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima pada tahun anggaran tertentu.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2011-2015 adalah sebesar Rp. 547.684.980.189,00 dengan rincian PAD dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain-lain PAD yang sah. Berikut adalah rincian PAD pada tahun 2011-2015:

**Tabel 3.3. PAD Kabupaten Tasikmalaya Pada Tahun 2011-2015**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>
1	2011	Rp. 55.771.204.716,00
2	2012	Rp. 65.473.795.748,00
3	2013	Rp. 77.089.192.106,00
4	2014	RP. 162.863.531.304,00
5	2015	Rp. 186.487.256.315,00
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 547.684.980.189,00</b>

*Sumber: Rekapitulasi Pendapatan BAPPEDA, 2011-2015.*

Dari data yang telah diperoleh dapat dijelaskan bahwa PAD Kabupaten Tasikmalaya dari tahun 2011-2015 terus mengalami kenaikan pendapatan. PAD paling banyak dihasilkan dari perolehan pendapatan lain-lain PAD yang sah pada setiap tahunnya. Hasil dari pajak daerah berjumlah Rp. 153.565.784.543,00. Hasil dari pajak retribusi sebesar Rp. 190.863.863.093,00. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 143.230.679.840,00. Kemudian yang terakhir adalah pendapatan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp. 396.940.419.344,00 (Rekapitulasi Pendapatan BAPPEDA, 2011-2015).

Kemudian Dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya termasuk besar. Dari tahun 2011-2015 jumlah dana perimbangan yang masuk di Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya berjumlah Rp. 6.915.514.134.439,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.4. Jumlah Dana Perimbangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Dana Perimbangan</b>
1	2011	Rp. 1.043.973.470.058,00
2	2012	Rp. 1.281.237.193.766,00
3	2013	Rp. 1.415.316.877.662,00
4	2014	RP. 1.541.035.901.962,00
5	2015	Rp. 1.633.950.690.991,00
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 6.915.514.134.439,00</b>

*Sumber: Rekapitulasi Pendapatan BAPPEDA, 2011-2015*

Pada perolehan dana perimbangan di Kabupaten Tasikmalaya tiap tahunnya mengalami kenaikan jumlah dana. Dana perimbangan diperoleh dari bagi hasil pajak

atau bagi hasil bukan pajak, bagi hasil pajak, dan juga bagi hasil bukan pajak atau sumber daya alam. Kemudian pembiayaan yang terakhir adalah dari lain-lain pendapatan yang sah yang bersumber dari dana hasil pajak dari Provinsi Jawa Barat, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari Provinsi, dan pendapatan kepala desa. Diperoleh dana dari 2011-2015 sebesar Rp. Rp. 6.446.714.381.320,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.5. Pendapatan Lain-lain Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Pendapatan lain-lain yang sah</b>
1	2011	Rp. 410.351.565.979,00
2	2012	Rp. 471.181.746.709,00
3	2013	Rp. 727.832.249.190,00
4	2014	Rp. 871.228.452.916,00
5	2015	Rp. 929.454.325.777,00
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 6.446.714.381.320,00</b>

*Sumber: Rekapitulasi Pendapatan BAPPEDA, 2011-2015.*

Dari ketiga pembiayaan untuk pembangunan daerah di Kabupaten Tasikmalaya yang paling banyak adalah bersumber dari dana perimbangan. Kemudian dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pendapatan lain-lain yang sah dari tahun ke tahun yaitu 2011-2015 selalu mengalami kenaikan. Hal ini tentu saja mendukung dan memperlancar pembangunan daerah di Kabupaten Tasikmalaya



karena dari segi pendanaan didukung baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun dari Kabupaten Tasikmalaya sendiri.

Jadi, Pendanaan untuk pembangunan daerah di Kabupaten Tasikmalaya didukung oleh 3 pembiayaan yaitu dari PAD, Dana perimbangan, dan juga pendapatan lain-lain yang sah yang anggarannya tiap tahun mengalami kenaikan atau bertambah banyak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari segi pendanaan sangat didorong untuk pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya.